

PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg
di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:
Rijal As'ary Mustaqim
NIM 07210002



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013

PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg
di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam (S.H.i)

Oleh:

Rijal As'ary Mustaqim

NIM 07210002



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg
di Pengadilan Agama Kota Malang)

Benar- benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 September 2013

Penulis,



Rijal As'ary Mustaqim

NIM 07210002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Rijal As'ary Mustaqim, NIM 07210002 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg
di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Malang, 10 September 2013

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A.

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

NIP 197306031999031001

NIP 196009101989032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rijal As'ary Mustaqim, NIM 07210002, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg
di Pengadilan Agama Kota Malang)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*).

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 196512052000031001 Ketua

2. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag. (_____)
NIP 196009101989032001 Seketaris

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. (_____)
NIP 197306031999031001 Penguji Utama

Malang, 23 September 2013

Dekan,

Dr. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

HALAMAN PERSEMPERBAHAN

Hidup adalah kegelapan jika tanpa Hasrat dan Keinginan
Semua Hasrat dan Keinginan adalah buta, jika tidak disertai Pengetahuan
Pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti Pelajaran
Setiap Pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai Cinta
Dan Cinta akan menyesatkan jika tidak disertai dengan Iman.

Berjuta terima kasihku untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak:
Muslimin & Ibu: Siti Asiyah, M.P.d.i, saudara-saudara dan seluruh
keluarga besarku atas segala perjuangan, dukungan dalam bentuk do'a,
spiritual, mental, material dan kepercayaan mereka yang membuatku
sanggup bertahan dalam langkah menuju cita-citaku dan harapan mereka.
Untuk Bapak & Ibu Guruku di TPQ, TK, SD, SMP, MAN, dan Universitas.
Untuk teman-teman saya Syariah angkatan 2007, Kontrakan, Ma'had,
PKLI Nganjuk, dan yang spesial untuk sang kekasih, Roichatul Jannah
yang selalu setia menemani dan memberikan semangat juang dalam setiap
detik langkah kehidupanku.

Sungguh segala kemampuan untuk menuntaskan setumpukan lembaran dan
goresan tinta ini takkan pernah ada artinya tanpa semangat dan
kepercayaan yang telah mereka berikan untukku. Hanya inilah persembahan
kecilku yang bisa aku berikan untuk mereka.

Terimakasih . . . !!!

(Jujur, Semangat & Positive Thinking)

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالْقِيَمِ الْمُحَسَّنَةِ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ



“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

(Q.S. An Nahl : 125)¹

(Jujur, Semangat & Positive Thinking)

¹ Al Qur'anul Karim. (Bandung: CV Jumanatul Ali Arrt). Hal. 280.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah ‘Azza wajalla, atas rahmat, hidayah serta inayahnya yang sangat melimpah ruah kepada seluruh makhluk di semesta alam. Dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya pula penulisan skripsi yang berjudul, PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang). dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya tiada henti. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berada di jalan-Nya. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di akhirat kelak. Amien..

Penulis mengakui bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. K.H. Dahlan Tamrin M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliahan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Dr. Hj. Mufidah Ch.,M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi terselesainya skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Segenap keluarga besar di Singosari, yang telah memberikan dukungan baik secara materil, moral maupun spiritual dengan curahan kasih sayang dan doanya kepada peneliti dalam menuntut ilmu.
8. Semua sahabat-sahabatku dan teman-teman Fakultas Syariah yang selalu memberikan warna dalam mengarungi kehidupan di kampus.

Semoga amal mereka diridhoi Allah SWT dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 September 2013

Penulis,

Rijal As'ary Mustaqim
NIM 07210002

HALAMAN TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing

² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, (Malang, Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2012), 74-76

ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û. Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan î, melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

C. Ta' Marbutah (š)

Ta' marbutah (š) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan "h", atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadhd jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3. Surat Putusan Perkara No 0232/ Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- Lampiran 4. Bukti Konsultasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI -----	iii
HALAMAN PERSETUJUAN -----	iv
HALAMAN PENGESAHAN -----	v
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	vi
MOTTO -----	vii
PRAKATA -----	viii
HALAMAN TRANSLITERASI -----	xi
DAFTAR LAMPIRAN -----	xiii
DAFTAR ISI -----	xiv
ABSTRAK -----	xvii
ABSTRACT -----	xviii
مستخلص البحث -----	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	9
C. Tujuan Penelitian -----	10
D. Kegunaan Penelitian -----	10
E. Batasan Penelitian -----	11
F. Deifinisi Operasional -----	11
G. Penelitian Terdahulu -----	14

H. Metode Penelitian -----	17
I. Sistematika Pembahasan -----	21

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Peradilan Agama-----	23
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga-----	41
C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam -----	45
D. Pengertian Penelantaran Dalam Rumah Tangga -----	53
E. Korelasi Alasan Perceraian dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang No 23 Tahun 2004 -----	58

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data -----	62
B. Analisis Data -----	78
1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Dapat Mengintegrasikan dan Menerapkan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Perceraian-----	78
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tidak Mengintegrasikan Dan Menerapkan Pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 Kedalam Putusan Perkara No:0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg -----	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan -----	107
B. Saran -----	108

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

ABSTRAK

Mustaqim, Rijal As'ary. 07210002. **Pasal 9 Undang Undang No 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Kota Malang).** Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Kata Kunci: Pasal 9 UU PKDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,Perceraian

Pasal 9 UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT, yang mayoritas korbananya adalah perempuan (istri) dan anak mereka , merupakan implikasi dari semua alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (sebagai contoh : seorang kepala keluarga yang meninggalkan keluarganya 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang jelas, secara otomatis pula melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mengantarkan pada kondisi penelantaran). Maka secara tersirat didapati benang merah antara keduanya (*pasal 9 UU. Penghapusan KDRT / penelantaran rumah tangga dan alasan perceraian pasal 19 PP. 9/1975 Jo. Pasal 116 KHI*), yang mana pada banyak kasus, alasan-alasan tersebut berkaitan langsung, diawali atau bahkan berakibat pada sebuah penelantaran yang muaranya pada syarat mutlak dari pada alasan melakukan perceraian itu sendiri yaitu sebuah '*ketidak rukunan dalam rumah tangga*' atau '*sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*'.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum perceraian.

Dari hasil penelitian diperoleh sebuah kesimpulan bahwa di Pengadilan Agama Kota Malang ternyata tidak di temukan satupun kasus gugat cerai dengan alasan KDRT yang didalam putusannya hakim ,mengintegrasikan dan menerapkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan. Dengan alasan Pengadilan Agama sudah ada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian, kebanyakan hakim hanya menggunakan dalil tersebut dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Mustaqim, Rijal As'ary . 07210002 . Article 9 Law No. 23 of 2004 as a Divorce Reason in the Religious Court (Analysis Study of Case VerdictNo.0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg In Malang religious court). Thesis . Department: Al - ahwal al - Syakhshiyah . Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Keywords: Article 9 of Law Elimination of Domestic Violence, Domestic Violence, Divorce.

Article 9 of Law No. 23 on the Elimination of Domestic Violence, in victims the victim majority are female (wives) and their children , is an implications of all divorce reasons as it stated in Article 39 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 Jo Article 116 Compilation of Islamic Law (for example : a head of a family who leaves his family during 2 years successively without any permit and obvious reason, reason automatically also neglect his duties as heads of households that leads to neglect condition) . Then, implicitly there is a relation between both of them (*Article 9 of Law the Elimination of Domestic Violence / negligence of household and divorce reasons article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 Jo . Article 116 KHI*), in many cases , those reasons are directly related , preceded or even resulted in a neglect. It finally refers to an absolute requirement for divorce justification that are a '*lack of domestic harmonious ' or 'there is no hope of living in harmony again in the household '*'.

This research is a normative legal research done by analyzing secondary data. This normative research is a library research or documentary study due to the research object in the form of legal public documents. They are the legal data from Religious Court. The legal research done by only examining library materials or secondary data can be called as normative legal research or library materials or secondary data can be called as normative legal research or library legal research. The approach used is a statute approach. It is done by conducting legislation assessment related to the central theme of the research. This research employs the approach to analyze the regulation of divorce law.

From the results, it can be concluded that in Malang Religious Court there is no divorce case with domestic violence reason. In the decision, the judges integrate and apply Article 9 Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as the reference. Because there is an Islamic Law Complication concerning divorce reason, most of the judges only use that reference to decide the case of divorce reason of domestic violence.

**PASAL 9 UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama
Kota Malang)**

Rijal As'ary Mustaqim

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ridjal.mustaqim@yahoo.com

Abstrak

The objective of research is to determine the extent to which religious court judge integrate Article 9 of Law No. 23 of 2004 into the decision in case No. 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Religious Court Malang. Metode this study, using a normative study of which examines the legal principles by using analytical normative juridical approach. While the data collection techniques, researchers used studies by searching the documentation from the source material in the form of documents, a copy of the verdict, the facts and the record. The results of this study the researchers concluded. First, Article 9 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence relevant and can be applied and used as legal basis for divorce cases due to violation of Article 116 of the Compilation of Islamic Law (b), (d), and (g) and violations on Article 19, point (d) Regulation 1975, as there are civil rights were violated by either the husband or the wife. Both religious court judges are required to have a high sensitivity in considering divorce grounds in which there is an element of domestic violence and is a legal obligation for him to integrate into the Elimination of Domestic Violence Act so that the judge's decision is expected to minimize domestic violence through its decisions.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hakim pengadilan agama mengintegrasikan pasal 9 Undang Undang No 23 Tahun 2004 kedalam putusan perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode Penelitian ini, menggunakan penelitian normatif yang mengakaji tentang yang mengkaji tentang asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative analitis. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumentasi dengan cara melakukan pencarian bahan dari sumbernya berupa dokumen, salinan putusan, fakta dan catatan. Hasil dari penelitian ini peneliti menyimpulkan. Pertama, Pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga relevan dan dapat diterapkan serta dijadikan payung hukum dalam perkara perceraian akibat pelanggaran Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), (d), dan (g) dan pelanggaran atas pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, karena ada *hak-hak keperdataan* yang dilanggar oleh salah satu pihak antara suami atau isteri. Kedua hakim Peradilan Agama dituntut untuk mempunyai sensitifitas yang tinggi dalam mempertimbangkan alasan perceraian yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan kewajiban hukum baginya untuk mengintegrasikan UU PKDRT ke dalam putusan hakim sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui putusannya.

Kata Kunci: Pasal 9 UU PKDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian

مستخلص البحث

أشعرى مستقي، رجال ، 2013.07210002 الفصل 9 القانون الرقم 23 سنة 2004 كسبب للطلاق في المحكمة الشرعية (دراسة تحليل قضاة القضية الرقم 0232/ ف د ت. غ/2013/ ف أ. مالانق في المحكمة الشرعية بمالانق. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرفه: الدكتور الحاجة مفيدة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الفصل 99 القانون العنف الزوجي، والعنف الزوجي والطلاق

الفصل التاسع القانون الرقم 23 عن نسخ العنف الزوجي حيث يكون معظم النساء أو الزوجات وأولادهن يصيّبهم ذلك تورط كل أسباب الطلاق كما قرر في الفصل 39 القانون رقم 1 سنة 1974 عن الأمور الزوجية جو الفصل 19 قانون الحكومة الرقم 9 سنة 1975 ، جو الفصل 116 جمع القضاء الإسلامي (مثلا: الزوج الذي ترك أهله سنتين متاليتين دون الاذن الصريح والسبب الواضح. بالأوتوماتيك أنه يهمل ما عليه من واجبات التي يؤديه إلى الاعمال).

ومن هناك يتضمن على الجمع بينهما) الفصل 9 عن حذف العنف الزوجي / اهمال الأهل وسباب الطلاق الفصل 9 ف. ف. 1975 جو. الفصل 116 جمع القضاء الإسلامي). حيث توجد في القضايا الأسباب المتعلقة المباشرة التي تبدأ أو حتى تؤدي إلى الاعمال حيث تكون غايتها الشرط المطلق بنسبة سبب إجرائية الطلاق نفسه آلا وهو "عدم الاتحاد في الأهل أو لا يوجد في الأهل رجاء الاتحاد مرة أخرى".

بملاحظة جنسية البحث، أن هذا البحث من بحث القضاء السلوكي حيث يجري بمطالعة البيانات الثانوية. وهذا البحث من ضمن الدراسة المكتبية أو دراسة الوثائق لأن موضوع البحث وثائق الرسمية الجمهورية. وهي البيانات الرسمية من المحكمة الشرعية. وأجرأ البحث بدراسة المراجع أو البيانات الثانوية فحسب ويمكن أن يسمى ببحث القضاء السلوكي أو دراسة القضاء المكتبي. ومدخل البحث مدخل قانوني يتعلق بموضوع البحث الرئيسي حيث يستخدم البحث لتحليل نواحي قانون القضاء الطلاقي.

ونتائج البحث أن في المحكمة الشرعية بمالانق عدم وجود القضية عن طلب الطلاق بالعنف الزوجي حيث يعتمد القاضي على الفصل التاسع القانون رقم 23 سنة 2004 عن العنف الزوجي في الجمع والتطبيق. باعتذر أن المحكمة الشرعية لها جمع القوانين الإسلامية التي تنظم حول أسباب الطلاق. وكثير القضاة يستدلون بها في قضاة القضية عن طلب الطلاق بالعنف الزوجي.